

RENCANA KERJA 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG

TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya **Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.**

Pada dasarnya Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Lingkungan Hidup sejak terbentuk pada tanggal 10 Januari 2020 sampai sekarang (triwulan I).

Namun sebagai salah satu bagian dari sistem perencanaan daerah, maka Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup juga menggambarkan perencanaan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sejalan dengan RPJMD Kab. Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023. Rencana Kerja (RENJA) merupakan rencana kerja tahunan yang dibuat untuk menunjang Visi dan Misi Dinas khususnya dan Kabupaten Sidenreng Rappang Umumnya. Renja ini pula nantinya yang terangkum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sidrap dan menjadi acuan setiap sektor/bidang lingkup Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2023.

Semoga dengan adanya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup ini, seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pangkajene Sidenreng, 23 Agustus 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup


Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG., MT
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip 19690507 199903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	01
I.1 LATAR BELAKANG	01
I.2 LANDASAN HUKUM	02
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN	03
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN	03
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	05
II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA	05
II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	17
II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	22
II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	22
II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM & KEGIATAN MASYARAKAT	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	58
III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI	58
III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA	58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	64
IV.1 PROGRAM DAN KEGIATAN	64
BAB V PENUTUP	81

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- g. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kab. Sidenreng Rappang Nomor 11 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 sampai dengan 2025 (Lembaran Daerah Nomor 26 Tahun 2007);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
- k. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;
- l. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan RKA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup periode 2018-2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu (Tahun 2020) dan capaian Renstra SKPD (Tahun 2021)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V P E N U T U P

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018- 2023 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 disajikan pada tabel T-C.29 sebagai berikut :

TABEL T-C. 29

**SUMMARY EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS
LINGKUNGAN HIDUP**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(outcome) /KEGIATAN(output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) PADA TAHUN 2019-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D RENJA SKPD TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S.D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
San Wajib Pelayanan ar									
ng Lingkungan Hidup									
gram Penunjang san Pemerintahan rah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		100	100	100	100	100	100

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersedian Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat Daerah</i>	100		100	100	100	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan</i>	9		0	0	0	3	3	33
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA yang dihasilkan</i>	3		1	1	100	1	2	67
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA Perubahan RKA-SKPD</i>	6		2	2	100	2	4	67
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA yang dihasilkan</i>	3		1	1	100	1	2	67
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dihasilkan</i>	6		2	2	100	2	4	67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian kinerja SKPD yang disusun</i>	15		4	4	100	4	8	53
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100		100	100	100	1	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	42	12	14	14	100	14	40	95
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	<i>Jumlah Laporan akhir tahun SKPD</i>	3	7	1	1	100	1	9	300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	<i>Jumlah koordinasi dan Pelaporan keuangan</i>	60	13	20	20	100	20	53	88

nan/Triwulan/Semester D									
ministrasi Umum ngkat Daerah	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi umum	100		100	100	100	100	100	100
yediaan Komponen alasi Listrik/Penerangan gunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang tersedia	453	151	151	151	100	151	453	100
yediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	72		12	12	100	36	48	67
yelenggaraan Rapat ordinasi Dan Konsultasi D	Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam keluar daerah	600	135	135	135	100	220	490	82
gadaan Barang Milik rah Penunjang Urusan erintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	0	100	100	100	100	100	100
	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	30		15	15	100	15	30	100
yediaan Jasa unjang Urusan erintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100		100	100	100	100	100	100
yediaan Jasa Surat yurat	Jumlah Dokumen yang bermaterai	1050		325	325	100	500	825	79

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	36	12	12	12	100	12	36	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36	12	12	12	100	12	36	100
Peliharaan Barang x Daerah Penunjang dan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100		100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara rutin/berkala	100	12	1	1	100	100	113	113
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Subsidi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas operasional yang dipelihara rutin/berkala	100	53	71	71	100	100	224	224
Peliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	100	1	1	1	100	100	102	102
Peliharaan/Rehabilitasi Bangunan dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	100	24	84	84	100	100	208	208

Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100		100	100	100	100	100	100
Program Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH	55		100	100	100	100	100	182
Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen IKPLHD	2		1	1	100	1	2	100
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		100		100	100	100	100	100	100
Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		4	0	0	0	0	1	1	25
Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0		3	3	100		3	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	100		40	40	100	100	100	100
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100		100	100	100	100	100	100

koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kawasan Binaan untuk dampak perubahan iklim	6	1	2	2	100	2	5	83
pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laboratorium yang dikelola	6		2	1	50	1	2	33
Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100		100	100	100	100	100	100
Pemberian Informasi mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3	2	1	1	100	1	4	133
Penghentian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah IPAL Biogester terbangun	6	0	3	3	100	3	6	100
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100		100	100	100	100	100	100
koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber pencemaran		1						0	0
koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Mediasi		1					-	0	0

ordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Kesiapan		1						0	0
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	20		18	18	100	19	37	183
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan capaian pengelolaan keanekaragaman hayati	100		100	100	100	100	100	100
Program Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Kawasan Hutan		4	0	0	0		1	1	25
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang terpelihara	24	1	8	8	100	8	17	71
Program Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya	Jumlah taman keanekaragaman hayati lainnya yang dikelola	3		2	2	100	1	3	100
Program Pengendalian Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	100		100	100	100	100	100	100
Program Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	100		100	100	100	100	100	100

lokasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Syarat Administrasi Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 yang memenuhi syarat administrasi	15		5	5	100	5	10	67
Kelembagaan Limbah B3 Item 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah	100		0	100	100	100	100	100
koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, Pengolahan, atau Penimbunan	Jumlah rekomendasi /pengangkutan/ pemanfaatan pengolahan dan/atau penimbunan	5		5	5	100	7	12	240
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Lingkungan dan Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100		100	100	100	100	100	100
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin	100		100	100	100	100	100	100

Itas Pemenuhan ntuan dan Kewajiban ingkungan dan/atau PPLH	Jumlah Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup	56		12	12	100	24	36	64
awasan Usaha atau Kegiatan yang Izin ingkungan Hidup, Izin H yang Diterbitkan oleh erintah Daerah upaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin ingkungan hidup izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah	150	36	50	50	100	50	136	91
gram Pengakuan eradaan Masyarakat um Adat (MHA), arifan Lokal dan Hak a yang terkait dengan H	Persentase pengakuan keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100		100	100	100	100	100	100
gakuan MHA, Kearifan al, Pengetahuan isional, dan Hak MHA g Terkait dengan H	Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	3		100	100	100	100	100	3333
ordinasi, Sinkronisasi, ediaan Data, dan masi Pengakuan eradaan MHA Kearifan al atau Pengetahuan isional dan Hak arifan Lokal atau getahuan Tradisional Hak MHA Terkait an PPLH	Jumlah kegiatan koordinasi sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan MHA yang terkait PPLH	3	0	1	1	100	1	2	67

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	100		100	100	100	100	100	100
Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase penghargaan lingkungan hidup	100		100	100	100	100	100	100
Nilai Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Ma/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Penguatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Nilai Capaian Adipura	3	1	1	1	100	1	3	100
	Jumlah Sekolah yang mendapat predikat sekolah adaiwiyata	45	15	5	15	300	15	45	100
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100		100	100	100	100	100	100
Pelelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Penguatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100		100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	15	0	15	15	100	15	30	200

koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Litigasi Lingkungan di Luar Pengadilan Melalui Pengadilan								0	
Program Pengelolaan Sampahan	Persentase pengelolaan samoah di wilayah kabupaten/kota	48		70	70	100	73	143	301
Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Persampahan	100		100	100	100	100	100	100
Pengurangan Sampah dan Melakukan Pembatasan, Pendaauran dan Pemanfaatan Bali	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	24		24	24	100	24	48	200
Pengurangan Sampah dan Melakukan Pembatasan, Pendaauran, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Proses Akhir Sampah TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	74	0	74	74	100	74	148	200
	Persentase Kelancaran Saluran Drainase	100	0	100	100	100	100	100	100
	Operasional TPA/TPST/SPA dikabupaten/kota	80	0	80	80	100	80	160	200
Persediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	4	3	1	1	100	1	5	125

II.2 ANALIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Lingkungan Hidup yang terbentuk pada tahun 2020 sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang didasarkan pada Peraturan Bupati Sidrap No. 171 Tahun 2019 diharapkan mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah khususnya dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dalam penyediaan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup selaku Instansi teknis adalah meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang berwawasan lingkungan dan tugas-tugas pembantuan lainnya yang diberikan oleh Bupati berdasarkan bidang tugas dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
4. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
5. Pengembangan system informasi Lingkungan Hidup;
6. Pemberian izin lingkungan;
7. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan/kebersihan beserta pembiayaan mulai dari tahap penampungan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pembuangan akhir sampah;
8. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Lingkungan Hidup telah menuangkannya dalam Rencana Strategis dalam bentuk Visi dan Misi Dinas.

Visi Dinas Lingkungan Hidup yaitu ***Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai daerah agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan sejahtera*** yang memiliki makna :

1. **Maju**, yaitu : Mengandung makna adanya perkembangan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Momentum pertumbuhan ekonomi Propinsi dan Nasional akan menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat. Didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur yang menciptakan kelancaran aksesibilitas antar wilayah, disertai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik pula secara simultan menciptakan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
2. **Religius**, Yaitu : Mengandung makna kondisi masyarakat yang kuat dan teguh memegang nilai-nilai agama dan budaya setempat sebagai ciri khas dan bahkan lebih menonjol dibanding dengan daerah lain
3. **Aman**, Yaitu : Mengandung makna terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.
4. **Sejahtera**, Yaitu : Mengandung makna peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan meningkatnya IPM pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik materual maupun non material.

Misi Dinas Lingkungan Hidup yang dirumuskan adalah Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan

Selaras dengan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup maka dilaksanakan program dan kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Secara umum analisa kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel
T-C.30 :

TABEL T C 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ersentase emenuhan okumen erencanaan ngkungan Hidup			100%	100%	100%	100%	100%						
ersentase engendalian encemaran ngkungan Hidup			-	-	40%	60%	80%						
ersentase luasan TH Publik dari Luas ilayah Kota / erkotaan			15%	16,36%	17,64%	20%	20%						
ersentase engurangan Limbah an Berbahaya an Beracun (B3)			-	-	70%	89%	92%						

ersentase Ketaatan enanggungjawab saha dan atau egiatan Terhadap in Lingkungan, Izin PLH dan PPU LH ang Diterbitkan oleh emerintah Daerah ab/Kota			-	-	87%	87%	90%						
akupan Pengakuan eberadaan MHA, earifan Lokal dan ak MHA yang erkait dengan PPLH			-	-	65,07%	85,10%	90%						
akupan enghargaan Bidang ngkungan Hidup			100%	100%	100%	100%	100%						
ersentase engaduan asyarakat yang itindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%						
ersentase engelolaan sampah wilayah abupaten/kota			62%	65,1	67,4	69,2	72,5						

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Partisipasi/minat atau kesadaran masyarakat rendah akan pentingnya kebersihan lingkungan
2. Menurunnya kualitas TPA karena sampah tidak terproses sebagaimana mestinya
3. Terjadi Hambatan Aliran Air Buangan pada Saluran Drainase Sampah, Gulma dan Sedimen yang menghambat aliran air buangan sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat
4. Sosialisasi tentang kriteria penilaian adipura
5. Partisipasi masyarakat masih rendah dalam program penanaman pohon
6. Kurangnya tokoh masyarakat yang mengetahui hukum adat dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
7. Penguatan Kelembagaan Berbasis Lingkungan Hidup (ADIWIYATA)

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD sangat dibutuhkan dalam merumuskan perencanaan baik pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan program dan kegiatan yang matang dan tentunya bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Sistem Perencanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan di Indoneia dikenal dengan adanya Perencanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) artinya memungkinkan menggali ide-ide dan gagasan masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan. Sistem perencanaan dengan metode tersebut dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
2. Perencanaan metode dari atas kebawah (top down planning) untuk memungkinkan terjadinya perpaduan antara perumusan Kebijakan

Pemerintah dan Keinginan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan terjadinya proses perencanaan tersebut, maka kita membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel T-C.31

Tabel T C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Wajib Pelayanan Dasar					Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
Dinas Lingkungan Hidup				19.186.954.000	Bidang Lingkungan Hidup				19.186.954.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	4.731.641.700	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.731.641.700	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketetapan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100 %	92.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketetapan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	92.000.000	

Penyusunan dan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sidrap	3	Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sidrap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	20.000.000	
Penyusunan dan Perencanaan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sidrap	1	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000	
Penyusunan dan Perencanaan RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Sidrap	2	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sidrap	Jumlah dokumen yang disusun	2	Dokumen	5.000.000	
Penyusunan dan Perencanaan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sidrap	1	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000	
Penyusunan dan Perencanaan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sidrap	2	Dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	8.000.000	

inasi dan sunan an Capaian a dan Ikhtiar asi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidrap	5	Dokumen	49.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dok ume n	49.000.0 00	
Administrasi ngan gkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	3.704.458.100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	3.704.45 8.100	
ediaan Gaji unjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	14	bulan	3.679.459.100	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	bula n	3.679.45 9.100	
inasi Dan sunan n Keuangan Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sidrap	1	laporan	6.999.000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	lapo ran	6.999.00 0	

Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sidrap	20	laporan	18.000.000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	20	laporan	18.000.000	
Administrasi Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	167.340.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	167.340.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sidrap	151	buah	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sidrap	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	151	buah	6.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sidrap	36	Eksample	4.005.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sidrap	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Eksample	4.005.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap	200	kali	157.335.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	kali	157.335.000	

daan g Milik h Penunjang n rintahan h	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100	%	100.860.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	100.860. 000	
daan Sarana asarana g Kantor angunan a	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sidrap	10	Unit	100.860.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sidrap	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	100.860. 000	
daan Jasa ang Urusan rintahan h	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	421.183.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	421.183. 600	
daan Jasa Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidrap	350	lembar	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350	lem bar	5.000.00 0	
daan Jasa ikasi, er Daya Air strik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sidrap	12	bulan	68.040.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	bula n	68.040.0 00	
daan Jasa nan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sidrap	12	bulan	348.143.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	bula n	348.143. 600	

Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100	%	245.800.000	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	245.800.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Perorangan Dinas Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Sidrap	100	%	40.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sidrap	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	100	%	40.300.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sidrap	100	%	135.670.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sidrap	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	100	%	135.670.000	

							Operasional atau Lapangan			
Pemeliharaan Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sidrap	100 %	40.000.000	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sidrap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	40.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sidrap	100 %	29.830.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Sidrap	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	29.830.000	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		100 %	210.265.100	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	210.265.100	
Program Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH		100 %	171.044.900	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH	100 %	171.044.900	

Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Sidrap	2	Dokumen	171.044.900	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2	Dokumen	171.044.900	
Penyelenggaraan Kegiatan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Presentase penyelenggaraan KLHS		100	%	39.220.200	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Presentase penyelenggaraan KLHS	100	%	39.220.200	
Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Sidrap	1	Dokumen	13.059.200	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	13.059.200	
Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Sidrap	2	Dokumen	26.161.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2	Dokumen	26.161.000	
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup		100	%	1.068.923.000	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	100	%	1.068.923.000	
Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		100	%	984.290.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100	%	984.290.000	

nasasi, nisasi dan anaan ndalian Emisi umah Kaca, si dan si han Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Sidrap	2	Lokasi	30.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	Lok asi	30.000.00 0	
olaan torium ngan Hidup aten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Sidrap	2	Kali/Pen gujian	954.290.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2	Kali /Pe ngu jian	954.290.0 00	
nggulan maran au akan ngan Hidup aten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		100	%	70.000.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100	%	70.000.00 0	
erian asi atan maran au akan ngan Hidup Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Sidrap	1	Laporan	40.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Sidrap	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	Lap ora n	40.000.00 0	

Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Sidrap	1	Titik	30.000.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sidrap	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1	Titik	30.000.000	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		100	%	14.633.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100	%	14.633.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Sidrap	1	Dokumen	7.333.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	Dokumen	7.333.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Sidrap	1	Dokumen	3.650.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1	Dokumen		

nasional, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Sidrap	1	Dokumen	3.650.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	Dokumen		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan		100	%	2.813.467.300	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	100	%	2.813.467.300	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		100	%	2.813.467.300	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100	%	2.813.467.300	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Sidrap	2	Ha	8.550.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Sidrap	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Ha		
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Sidrap	8	Ha	1.804.302.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sidrap	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Ha	1.804.302.000	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Sidrap	1	Ha	1.000.615.300	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Sidrap	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Ha	1.000.615.300	

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		100	%	22.230.100	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	100	%	22.230.100	
Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3		100	%	5.000.100	Penyimpanan sementara Limbah B3		Persentase Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	100	%	5.000.100	
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Sidrap	5	laporan	5.000.100	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Sidrap	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	5	laporan	5.000.100	
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah		100	%	17.230.000	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah	100	%	17.230.000	

nasi dan isasi olaan B3 dengan ntah si dalam ngkutan, faatan, ahan, u unan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Sidrap	5	Dokumen	17.230.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	5	Dokumen	17.230.000	
---	---	--------	---	---------	------------	---	--------	---	---	---------	------------	--

manajemen dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		100	%	48.255.600	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	%	48.255.600	
manajemen dan pengawasan terhadap Usaha dan atau Kegiatan Izin Lingkungan dan PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin		100	%	48.255.600	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin	100	%	48.255.600	
fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Sidrap	24	Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	24	Dokumen	20.000.000	

Pengawasan dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	50	Laporan	28.255.600	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50	Laporan	28.255.600	
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		100	%	120.689.100	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	100	%	120.689.100	
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		100	%	120.689.100	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100	%	120.689.100	

nasasi, nisasi, diaan Data, ormasi kuan daan MHA n Lokal atau ahuan onal dan earifan Lokal engetahuan onal dan HA Terkait n PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Sidrap	1	dokume n	120.689.100	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	dok um en	120.689. 100	
am argaan ngan Hidup Masyarakat	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup		100	%	100.000.000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100	%	100.000. 000	
rian argaan ngan Hidup t Daerah aten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup		100	%	100.000.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup	100	%	100.000. 000	
an Kinerja rakat/Lemba rakat/Dunia Dunia ikan/Filantro m ungan dan olaan ngan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Sidrap	1	Entitas	100.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sidrap	Jumlah Masyarakat/Lemb aga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filant rophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1	Enti tas	100.000. 000	

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti		100	%	50.048.000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100	%	50.048.000	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		100	%	50.048.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100	%	50.048.000	
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Sidrap	10	Dokumen	25.000.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	10	Dokumen	25.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Sidrap	10	Dokumen	25.048.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	10	Dokumen	25.048.000	

Program Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota		100	%	10.021.434.100	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	100	%	10.021.434.100	
Program Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Persampahan		100	%	10.021.434.100	Pengelolaan Sampah		Persentase Pengelolaan Persampahan	100	%	10.021.434.100	
Program Pengelolaan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Sidrap	1	Laporan	1.029.997.800	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	Laporan	1.029.997.800	
Program Pengelolaan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Sidrap	24	Ton	5.441.436.300	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	24	Ton	5.441.436.300	
Program Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Sidrap		Unit	3.550.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,		Unit	3.550.000.000	

Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi SKPD saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Masyarakat khususnya terkait dengan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas LH sepanjang anggaran mampu terakomodir dan mampu memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Dalam usulan Musrenbang tahun ini, masyarakat umumnya mengusulkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Dan hal ini juga didukung oleh sebagian besar hasil reses DPRD Kab. Sidenreng Rappang. Adapun daftar usulan Musrenbang, hasil Reses DPRD dan usulan Prioritas SKPD secara lengkap tercantum dalam tabel T-C.32

**DAFTAR USULAN MASYARAKAT DALAM MUSREMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Anggusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi SKPD	Status
AHMAN	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggulangan Banjir	Adanya Pendakalan Pada Saluran Pembuangan(Pengerukan Saluran Pembuangan pada sektor pertanian, 2000m)	Dusun I, Dusun II, dan Dusun III Bila Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Pitu Raise	Bila Riase	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 500 m Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
arlina	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya AIR	pengerukan sungai ini sangat perlu karena air sering meluap apa bila hujan deras	dusun 1 desa padangloang alau, Kab. Sidenreng Rappang	Dua Pitue	Padangloang Alau	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 100 M Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
arlina	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya AIR	air sering meluap ketika hujan deras dan musim hujan karena masih dangkalnya sungai	dusun 2 desa padangloang alau, Kab. Sidenreng Rappang	Dua Pitue	Padangloang Alau	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 250 M Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

rlina	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya AIR	sungai masih dangkal dan air sering meluap saat musim hujan	dusun 3 kandiawan g desa padangloa ng alau, Kab. Sidenreng Rappang	Dua Pitue	Pada ngloa ng Alau	Kabupa ten/Kot a	DINAS PENGELOL AAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 250 M Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kab upaten/Kota
IARDI	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembalian Fungsi Sungai	Tepian yang terkikis Air Sungai,(pengerukan Sungai,,)(500M)	Dusun I,Dusun III,IV Dan V, Kab. Sidenreng Rappang	Pitu Raise	Belaw ae	Kabupa ten/Kot a	DINAS PENGELOL AAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 500 meter Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kab upaten/Kota
IARDI	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggulangan Banjir	Seringnya air sungai yang naik dan merendam pemukiman,(Tanggul / Talud),(1500 M)	Dusun I,Dusun III,IV dan Dusun V, Kab. Sidenreng Rappang	Pitu Raise	Belaw ae	Kabupa ten/Kot a	DINAS PENGELOL AAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1500 meter Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kab upaten/Kota
RIAH	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya AIR	Penggerukan Saluran Lasipeppa - Bola Jebbae	Dusun Mario, Kab. Sidenreng Rappang	Kulo	Mario	Kabupa ten/Kot a	DINAS PENGELOL AAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 250 meter Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kab upaten/Kota

RAHMAN	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggulangan Banjir	Rusaknya Sungai Akibat Penambangan (Normalisasi Sungai Bila 3000m) (mohon maaf. pada kamus usulan, penggulungan banjir masuk dinas PSDA)	Desa Bila Riase, Kab. Sidenreng Rappang	Pitu Raise	Bila Riase	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 3000 meter Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RAH	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengadaan Pompanisasi dan Lanjutan Pisanisasi Tellang-Tellang ke Abbokongang	Dusun Tellang-Tellang, Kab. Sidenreng Rappang	Kulo	Rijang Panua	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RAH	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembalian Fungsi Sungai	Pemasangan Beronjong belakang Kantor Desa Lama sampai belakang Poskesdes	Dusun Macege, Kab. Sidenreng Rappang	Kulo	Rijang Panua	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
awati ng,S,Sos	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggulangan Banjir	Diperlukan Pemasangan bronjong dan Talud di pinggir Sungai karena menyebabkan Air meluap ke pemukiman, lahan persawahan dan perkebunan	Lingkungan cilellang dan Oraisalo, Kab. Sidenreng Rappang	Panca Lautan	Wete	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

ma	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggulangan Banjir	karena seringnya abrasi di pinggir sungai	Desa corawali, Kab. Sidenreng Rappang	Panca Lautan	Cora wali	Kabupa ten/Kot a	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
erni	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggulangan Banjir	Erosi sungai yang sangat parah dibelakang rumah masyarakat sehingga pemasangan bronjong sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya longsor pada daerah aliran sungai dan menjaga keamanan bagi parah masyarakat yang ada dipinggiran sungai	Dusun Labempa, Kab. Sidenreng Rappang	Panca Lautan	Wani o Timor eng	Kabupa ten/Kot a	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 TITIK Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
erni	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggulangan Banjir	Luapan Air Sungai yang sering masuk ke Rumah Masyarakat dikarenakan kurangnya talud penahan banjir sehingga dibutuhkan pembangunan Talud penahan Banjir untuk menjaga keamanan bagi parah masyarakat yang ada dipinggiran sungai	Dusun Sabbang, Kab. Sidenreng Rappang	Panca Lautan	Wani o Timor eng	Kabupa ten/Kot a	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 TITIK Anggaran : 75000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

hriani ib,SE	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggulangan Banjir	Perkuatan Tlud Pemasangan Bronjong	Lingkunga n Maroangin , Kab. Sidenreng Rappang	Panca Lautan	Bilokk a	Kabupa ten/Kot a	DINAS PENGELOL AAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 TITIK Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kab upaten/Kota
awati	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Air	pembuatan pintu air BSI dan Leaning karena sudah rusak	Lingk I lajonga Dan Lingk II Rijang Benteng, kel. Lajonga, Kab. Sidenreng Rappang	Panca Lautan	Lajon ga	Kabupa ten/Kot a	DINAS PENGELOL AAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kab upaten/Kota
awati	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggulangan Banjir	diperlukan pemasangan Bronjong untuk mengurangi terjadinya pengikisan tanah warga yang ada disekitar sungai	Lingk I Lajonga dan Lingk II Rijang Benteng, kel. Lajonga, Kab. Sidenreng Rappang	Panca Lautan	Lajon ga	Kabupa ten/Kot a	DINAS PENGELOL AAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 TITIK Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kab upaten/Kota

				Paladan, Panjang 700 m, dusun IV Lemo								
sanah	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembalian Fungsi Sungai	Terkikisnya tanah sekitaran sungai	Jl. Harapan dan Jalan Lasinrang (Belakang Kuburan), Kab. Sidenreng Rappang	Panca Rijang	Rappang	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
asir	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembalian Fungsi Sungai	Dangkalnya Sungai Kel. Massepe	Jl. Pemukiman, Kab. Sidenreng Rappang	Tellu Limpoe	Messape	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 150 meter Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
asir	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembalian Fungsi Sungai	Longsornya Tanah Sungai Kel. Massepe	Jl. Pemukiman, Kab. Sidenreng Rappang	Tellu Limpoe	Messape	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
MIATI MAD	Individu	Pariwisata	Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Destinasi Wisata	Pinggiran Saluran Irigasi Perlu ditata	Lk. I dan Lk. II Kel. Baula, Kab. Sidenreng Rappang	Tellu Limpoe	Baula	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

ESA UKKANG	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggulangan Banjir	Rehab Tanggul dan Pemasangan Tiang Pancang. jika dibiarkan akan berdampak pada pemukiman dan persawahan, karna kondisi tanggul tersebut mengalami keretakan besar. Volume 100 Meter.	Dusun II Desa Salobukka ng, Kab. Sidenreng Rappang	Dua Pitue	Salob ukkan g	Kabupa ten/Kot a	DINAS PENGELO AAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 100 meter Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kab upaten/Kota
r, S.Pd	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Banyak persawahan warga masyarakat dusun V Tabaro yang tinggal menjadi lahan tidur akibat tidak ada perpipaan irigasi, Perpipaan Irigasi Sungai Tallang, Panjang 2000 m	Dusun V Tabaro, Kab. Sidenreng Rappang	Pitu Raise	Tanat oro	Kabupa ten/Kot a	DINAS PENGELO AAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 2000 meter Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kab upaten/Kota
r, S.Pd	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggulangan Banjir	Air Perpipaan Irigasi Bua Dao Tidak Lancar alibat Banjir Merusak Burongjong, Pengadaa n Burongjong Irigasi Bua Dau, Panjang 60 m	Dusun III Matajang, Kab. Sidenreng Rappang	Pitu Raise	Tanat oro	Kabupa ten/Kot a	DINAS PENGELO AAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 60 meter Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kab upaten/Kota
r, S.Pd	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Air Perpipaan sungai paladan tidak cukup untuk mengairi semua persawahan di Dusun IV Lemo, Pembangunan Saluran Tersiar Sungai	Dusun IV Lemo, Kab. Sidenreng Rappang	Pitu Raise	Tanat oro	Kabupa ten/Kot a	DINAS PENGELO AAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 700 meter Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kab upaten/Kota

atullah	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggulangan Banjir	Pembangunan Bronjong	Lk I dan II Kel.Pajalele, Kab. Sidenreng Rappang	Tellu Limpoe	Pajalele	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
Amin	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Air	tidak tersedianya pompanisasi air di desa Kalempang	Desa Kalempang, Kab. Sidenreng Rappang	Pitu Riawa	Kalempang	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
atullah	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya AIR	Perkuatan Talud/ Pemasangan Bronjong	LK. I dan II Kel. Pajalele, Kab. Sidenreng Rappang	Tellu Limpoe	Pajalele	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
atullah	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembalian Fungsi Sungai	Normalisasi Saluran Pembuangan	SD 2 Massepe, Kab. Sidenreng Rappang	Tellu Limpoe	Pajalele	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 200 meter Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

IKMAH	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembalian Fungsi Sungai	Masih adanya sungai yang perlu dikeruk	Dusun II Larua, Kab. Sidenreng Rappang	Tellu Limpoe	Teppo	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 200 meter Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
awati	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Air	PINTU AIR sudah tidak dapat di gunakan sehingga pengelolaan sumber daya air susah untuk dikelola oleh petani	Dusun I dan II, Kab. Sidenreng Rappang	Tellu Limpoe	Pole wali	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
S.I.P.	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Tanggul rusak dan longsor	Dusun I Kampung Baru, Kab. Sidenreng Rappang	Dua Pitue	Taccimpo	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
AMAH	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembalian Fungsi Sungai	untuk mengembalikan fungsi sungai maka perlu diadakan Beronjong Sungai Dekat Jembatan agar Tanah sekitarnya tidak terkikis	Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	Panca Rijang	Bulowatang	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

S.I.P.	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Bronjong BL5 Kanan	Dusun I Kampung Baru, Kab. Sidenreng Rappang	Dua Pitue	Tacimpo	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
S.I.P.	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Saluran Pembuangan	Dusun II Amessangeng, Kab. Sidenreng Rappang	Dua Pitue	Tacimpo	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 200 meter Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
rio	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembalian Fungsi Sungai	buberapa titik sungai sudah dangkal	dusun 1 lasiwala, Kab. Sidenreng Rappang	Pitu Riawa	Lasiwala	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RUNI	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya AIR	Pengerukan Sungai Celli"e karena penyempitan sungai dan sering terjadi banjir di sungai celli""e sekitar 5 Km	Dusun I Carawali, Kab. Sidenreng Rappang	Watan g Pulu	Cara wali	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 5000 meter Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RUNI	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengerukan Sungai Lakau kau Karena Sering mengalami banjir dan penyempitan sungai di dusun II Cenrana sekitar 2 Km	Dusun II Cenrana, Kab. Sidenreng Rappang	Watan g Pulu	Cara wali	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 2 km Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

RNA	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembalian Fungsi Sungai	Pembangunan Beronjong Sungai Kulo sebelah Barat Jembatan Kulo	Dusun Tippulu, Kab. Sidenreng Rappang	Kulo	Kulo	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RNA	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembangunan Beronjong Sungai	Dusun Tippulu, Kab. Sidenreng Rappang	Kulo	Kulo	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RNA	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembalian Fungsi Sungai	Penanggulangan Tebing Sungai	Dusun Tippulu, Kab. Sidenreng Rappang	Kulo	Kulo	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 75000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
RNA	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembalian Fungsi Sungai	Pembangunan Bronjong	Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	Kulo	Kulo	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
maini	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggulangan Banjir	saluran air di daerah lombo terkadang banjir maka di usulkan untuk pembangunan saluran air	Dusun II Amessang eng, Kab. Sidenreng Rappang	Panca Lautan	Lise	Kabupaten/Kota	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 100000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

ESA UKKANG	Individu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggulangan Banjir	wilayah tersebut menjadi tikungan alur sungai, pengikisan tanah di wilayah tersebut semakin mengawatirkan setiap terjadi curah hujan tinggi bisa menyebabkan terputusnya salah satu jalan Desa, jika dibiarkan juga dapat berdampak besar (BANJIR) pada pemukiman dan persawahan. Volume 200 Meter.	dusun II, Kab. Sidenreng Rappang	Dua Pitue	Salob ukkan g	Kabupa ten/Kot a	DINAS PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR	DINAS PENGELOL AAN SUMBER DAYA AIR	Rekomendasi : Lanjut Ketahapan berikutnya Koefisien : 1 titik Anggaran : 50000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kab upaten/Kota
---------------	----------	---	--------------------------	--	---	--------------	---------------------	------------------------	---	--	---	---

**DAFTAR POKOK - POKOK PIKIRAN ANGGOTA DPRD
TAHUN ANGGARAN 2023**

Anggusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir
RAHMAN AFA	NASDEM	Lingkungan Hidup	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	PENGADAAB DRUM/ TEMPAT SAMPAH	tersebar di kecamatan panca rijang kulo dan baranti, Kab. Sidenreng Rappang	Panca Rijang	Lelebata	1000 unit	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
YHOGA NTARA	GERINDRA	Lingkungan Hidup	Pengadaan Sumur Resapan (Biopori)	Karena kurangnya serapan air bersih sehingga perlu pembangunan sumur bor	Mojong, Kab. Sidenreng Rappang	WT. Sidenreng	Mojong	1 tempat	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UL APPAS,	NASDEM	Lingkungan Hidup	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	bantuan kendaraan pengangkut sampah dan kontainer sampah	panca rijang, kulo, baranti, Kab. Sidenreng Rappang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	7 unit	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UL APPAS,	NASDEM	Lingkungan Hidup	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	bantuan kendaraan Pengangkutan sampah, kontainer sampah	Panca Rijang, Kulo, Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	5 unit	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

U. SITI IAH, M.Si	GOLKAR	Lingkungan Hidup	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	PENGADAAN MESIN PENCACAH SAMPAH TPS 3 DI BARANTI	BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	Baranti	Baranti	1 Unit	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
HUDDIN	BELA UMAT	Lingkungan Hidup	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	sampah banyak menumpuk	kel rappang, Kab. Sidenreng Rappang	Panca Rijang	Rappang	3 unit	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ADLI TI, SH	BELA UMAT	Lingkungan Hidup	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	sampah menumpuk butuh kontainer	desa teteaji, Kab. Sidenreng Rappang	Tellu Limpoe	Teteaji	3 unit		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
L, S.Sos	BELA UMAT	Lingkungan Hidup	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	PENGANGKUTAN SAMPAH/ KONTAINER SAMPAH SECARA RUTIN	Salomallori, Kab. Sidenreng Rappang	Dua Pitue	Salomalori	1 Titik		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Kebijakan Nasional dan provinsi terkait dengan Pembangunan Infrastruktur cukup beragam. Antara lain adanya ketentuan ruang terbuka hijau untuk perkotaan sekurang-kurangnya 20% dari luas area Kota/ perkotaan publik, pengurangan sampah perkotaan hingga 20% dan kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan Pembangunan Infrastruktur sebagai salah satu tupoksi Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu program kerja yang direncanakan diharapkan mampu menjabarkan kebijakan tersebut.

Dari tiap-tiap kebijakan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Khususnya di Kab. Sidenreng Rappang. Salah satu pelaksanaan kebijakan tersebut adalah terlaksananya kegiatan Penataan RTH, Pemeliharaan RTH dan Penguatan kelembagaan berbasis lingkungan Hidup (Adiwiyata) yang bertujuan untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau sesuai luasan yang dipersyaratkan. Selain itu tuntutan penyediaan berbagai dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Infrastruktur yang terarah terus digalakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup khususnya dan oleh Pemerintah Kabupaten pada umumnya

Berdasarkan hal ini, terlihat pentingnya perencanaan yang bersinergi antara Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Tujuan adalah rumusan kondisi yang diinginkan sebagai penjabaran masing-masing misi dan merupakan prioritas tertinggi misi tersebut, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur pembangunan daerah secara keseluruhan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau dapat dianggap sebagai indikator dari kondisi yang diharapkan sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan

Adapun tujuan renja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 – 2023 yang merupakan penjabaran Visi, Misi Bupati untuk melaksanakan penganggaran secara efektif, efisien dan terukur sebagai wujud pelaksanaan perencanaan adalah ***Meningkatkan kualitas lingkungan.***

Sasaran Rencana Kerja adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang telah spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Meningkatkan efektifitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Program dan kegiatan strategis Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

C. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

D. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

E. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sub Kegiatan :

- Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

2. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

F. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

G. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

1. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak yang terkait dengan PPLH

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

H. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

I. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan

J. Program Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan :

- Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program / kegiatan dijalankan dalam upaya pencapaian tujuan bersama untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, beberapa faktor permasalahan yang dihadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran/target.

Program prioritas yang rencananya akan dibiayai tahun 2023 disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pencapaian visi dan misi kepala daerah menjadi rumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, karena secara tidak langsung berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk program kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Sehingga diharapkan adanya persamaan persepsi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan tim anggaran daerah dalam mengukur besaran anggaran yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sesuai tabel T-C.33

Tabel T-C 33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidrap

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
	Bidang Lingkungan Hidup				19.186.954.000				19.186.954.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	4.731.641.700			100 %	4.731.641.700
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketetapan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100 %	92.000.000			100 %	92.000.000
2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sidrap	4 Dokumen	20.000.000	DAU		3 Dokumen	20.000.000
2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sidrap	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.000.000

2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Sidrap	2	Dokumen	5.000.000	DAU		2	Dokumen	5.000.000
2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sidrap	1	Dokumen	5.000.000	DAU		1	Dokumen	5.000.000
2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sidrap	2	Dokumen	8.000.000	DAU		2	Dokumen	8.000.000
2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidrap	4	Dokumen	49.000.000	DAU		5	Dokumen	49.000.000
2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	3.704.458.100			100	%	3.704.458.100
2.01	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	560	Orang/bulan	3.679.459.100	DAU		560	Orang/bulan	3.679.459.100

2.01	05	<i>Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</i>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sidrap	1	laporan	6.999.000	DAU		1	laporan	6.999.000
2.01	07	<i>Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Sidrap	20	laporan	18.000.000	DAU		20	laporan	18.000.000
2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	167.340.000			100	%	167.340.000
2.06	01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sidrap	7	Paket	6.000.000	DAU		151	buah	6.000.000
2.06	06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sidrap	36	Eksampl er	4.005.000	DAU		36	Eksample r	4.005.000

2.06	02	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap	70	Laporan	157.335.000	DAU		200	kali	157.335.000
2.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100	%	100.860.000			100	%	100.860.000
2.07	01	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sidrap	10	Unit	100.860.000	DAU		10	Unit	100.860.000
2.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	421.183.600			100	%	421.183.600
2.08	01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidrap	350	lembar	5.000.000	DAU		350	lembar	5.000.000
2.08	02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sidrap	12	Laporan	68.040.000	DAU		12	bulan	68.040.000

2.08	03	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sidrap	12	Laporan	348.143.600	DAU		12	bulan	348.143.600
2.09		<i>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100	%	245.800.000			100	%	245.800.000
2.09	01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Sidrap	1	Unit	40.300.000			100	%	40.300.000

2.09	02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sidrap	70	Unit	135.670.000	DAU		100	%	135.670.000
2.09	09	<i>Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sidrap	1	Unit	40.000.000	DAU		100	%	40.000.000
2.09	10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sidrap	20	Unit	29.830.000	DAU		100	%	29.830.000
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup</i>		100	%	450.000.000			100	%	450.000.000
2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH		100	%	250.000.000			100	%	250.000.000

2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Sidrap	2	Dokumen	250.000.000	DAU	2	Dokumen	250.000.000
2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Presentase penyelenggaraan KLHS		100	%	200.000.000	DAU	100	%	200.000.000
2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Sidrap	1	Dokumen		DAU	1	Dokumen	
2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Sidrap	2	Dokumen	200.000.000	DAU	2	Dokumen	200.000.000
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup		100	%	1.622.383.000		100	%	1.622.383.000
2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		100	%	1.537.750.000		100	%	1.537.750.000

2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Sidrap	2	Dokumen	30.000.000	DAU		2	Lokasi	30.000.000
2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Sidrap	2	Dokumen	1.507.750.000	DAK		2	Kali/Pengujian	1.507.750.000
2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		100	%	70.000.000			100	%	70.000.000
2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Sidrap	11	Laporan	40.000.000	DAU		1	Laporan	40.000.000
2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Sidrap	11	Titik	30.000.000	DAU		1	Titik	30.000.000

2.03		<i>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Persentase Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		100 %	14.633.000			100 %	14.633.000
2.03	01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Sidrap	1 Dokumen	7.333.000	DAU		1 Dokumen	7.333.000
2.03	03	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Sidrap	1 Dokumen	3.650.000	DAU		1 Dokumen	3.650.000
2.03	04	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Sidrap	1 Dokumen	3.650.000	DAU		1 Dokumen	3.650.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan		100 %	2.812.852.000			100 %	2.812.852.000

2.01		<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		100	%	2.812.852.000			100	%	2.812.852.000
2.01	02	<i>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan</i>	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Sidrap		Ha	8.550.000	DAU			Ha	8.550.000
		<i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Sidrap	47	Ha	1.804.302.000	DAU		47	Ha	1.804.302.000
		<i>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya</i>	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Sidrap		Ha	1.000.000.000	DAU			Ha	1.000.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		100	%	22.230.100			100	%	22.230.100
		<i>Penyimpanan sementara Limbah B3</i>	Persentase Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3		100	%	5.000.100			100	%	5.000.100

		<i>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3</i>	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Sidrap	5 laporan	5.000.100	DAU		5 laporan	5.000.100
		<i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah		100 %	17.230.000	DAU		100 %	17.230.000
		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Sidrap	5 Dokumen	17.230.000	DAU		5 Dokumen	17.230.000

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		100 %	48.255.600	DAU		100 %	48.255.600
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin		100 %	48.255.600	DAU		100 %	48.255.600
		<i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Sidrap	12 Dokumen	20.000.000	DAU		24 Dokumen	20.000.000
		<i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	35 Laporan	28.255.600	DAU		50 Laporan	28.255.600

		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		100 %	120.689.100			100 %	120.689.100
		<i>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</i>	Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		100 %	120.689.100			100 %	120.689.100
		<i>Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Sidrap	1 dokum en	120.689.100	DAU		1 dokume n	120.689.100
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup		100 %	100.000.000			100 %	100.000.000

		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup		100	%	100.000.000			100	%	100.000.000
		<i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Sidrap	5	Entitas	100.000.000	DAU		1	Entitas	100.000.000
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti		100	%	50.048.000			100	%	50.048.000
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan		100	%	50.048.000			100	%	50.048.000
		<i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangan	Sidrap	10	Dokumen	25.000.000	DAU		10	Dokumen	25.000.000

		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Sidrap	10	Dokumen	25.048.000	DAU		10	Dokumen	25.048.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota		100	%	9.228.854.500	DAU		100	%	9.228.854.500
		<i>Pengelolaan Sampah</i>	Persentase Pengelolaan Persampahan		100	%	9.228.854.500	DAU		100	%	9.228.854.500
		<i>Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Sidrap	9	Laporan	1.029.997.800	DAU		9	Laporan	1.029.997.800
		<i>Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Sidrap	33.410	Ton	4.658.856.700	DAU		33.337	Ton	4.658.856.700

		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Sidrap	10 Unit	3.540.000.000	DAK		Unit	3.540.000.000
		JUMLAH PAGU				19.186.954.000				19.186.954.000

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Renja SKPD ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja SKPD 2022 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-program dapat memberikan hasil (*outcome*) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, 23 Agustus 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup


IP. H. ANDI FAISAL RANGGONG., MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip 19690507 199903 1 010